

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator terciptanya pembangunan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Di dalam konsep dasar pembangunan ekonomi islam, sumber daya manusia juga menjadi fokus utama dalam ekonomi. Tolak ukur manusia berkualitas dapat dilihat dari dari produksi dan hasil karya manusia itu sendiri sehingga kualitas manusia harus diperhatikan untuk esensi dan kemajuan bangsa (Abdillah, 2001), sebagaimana pesan dalam Q.S Hud ayat 61:

❦ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّي إِلَهٍ  
غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا  
إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

“Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS. Hud: 61)

Dalam surat Hud ayat 61 di atas, dinyatakan bahwa manusia dijadikan Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi yang mengemban tugas memakmurkannya. Dalam konteks kehidupan manusia yang sesungguhnya, ayat tersebut dipahami dengan melaksanakan pembangunan (Capra, 2008).

Implementasi nilai ekonomi Islam tidak bisa dilepaskan dari sistem yang diterapkan dalam suatu komunitas baik rumah tangga, masyarakat maupun negara. Sistem ekonomi Islam dapat berjalan dalam suatu komunitas yang dikembangkan nilai-nilai Islami baik dari sisi kelembagaannya maupun sistem sosialnya. Sehingga untuk mewujudkan tatanan ekonomi Islam tidak cukup hanya sekedar mendirikan lembaga-lembaga keuangan syariah saja tetapi juga harus menyangkut pengembangan dari aspek manusianya sebagai subyek dan obyek dalam sistem ekonomi tersebut (Yuliadi, 2016).

Untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara, *United Nations Development Program* (UNDP) mengenalkan konsep mutu modal manusia yang diberi nama *Human Development Index* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM memberikan suatu ukuran gabungan tiga dimensi tentang pembangunan manusia, yaitu dimensi kesehatan diukur dari tingkat usia harapan hidup, dimensi pendidikan diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan rata-rata lama sekolah dan dimensi daya beli yang memiliki standar hidup layak diukur dari paritas daya beli (UNDP, 2004). Rendahnya indeks pembangunan manusia mengindikasikan kurang maksimalnya penyelenggara pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas manusianya. Angka IPM yang rendah disebabkan karena kurangnya kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan penduduknya. Melalui IPM dapat diketahui perkembangan kualitas sumber daya manusia setiap provinsi di Indonesia. BPS menghitung IPM pada tingkat regional sejak tahun 1996, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu, untuk memantau keterbandingnya dengan capaian nasional, dihitung pula angka

IPM Indonesia. Tujuan dipublikasikan nilai IPM setiap provinsi adalah untuk mengetahui berapa besar keberhasilan pembangunan kualitas manusianya. Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi dengan angka IPM tertinggi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, IPM provinsi Bali menempati urutan ke lima dari 34 provinsi di Indonesia. Sehingga hal tersebut membuktikan bahwa sudah maksimalnya penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mewujudkan peningkatan kualitas manusia.

**TABEL 1.1**  
**Indeks Pembangunan Manusia Tertinggi di Indonesia**

Provinsi	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
DKI JAKARTA	78.08	78.39	78.99	79.6	80.06
DI YOGYAKARTA	76.44	76.81	77.59	78.38	78.89
KALIMANTAN TIMUR	73.21	73.82	74.17	74.59	75.12
KEPULAUAN RIAU	73.02	73.4	73.75	73.99	74.45
BALI	72.09	72.48	73.27	73.65	74.3
INDONESIA	73.81	68.9	69.55	70.18	70.81

*Sumber : Badan Pusat Statistik*

Kelima provinsi diatas mengalami peningkatan IPM dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dan juga mengalami posisi yang stabil dalam urutan IPM provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Pada tahun 2017 dari kelima provinsi diatas, hanya DKI Jakarta saja yang masuk kategori IPM sangat tinggi, sedangkan sisanya masuk kategori tinggi. Dalam sumbangsuhnya terhadap Produk Domestik Bruto nasional, Pulau Jawa merupakan penyumbang tertinggi dibandingkan dengan pulau lainnya, sehingga hal itu membuat DKI Jakarta dengan pusat perekonomiannya mampu menjadi provinsi dengan IPM tertinggi, disusul oleh provinsi DI Yogyakarta. Selain itu, semenjak tahun 2014 angka IPM provinsi bali

selalu berada di atas dari rata-rata IPM di Indonesia, hal itu menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi Bali sudah cukup baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Dari tabel diatas menunjukkan bahwa IPM Provinsi Bali masuk ke dalam kategori tinggi ( $70 < IPM < 80$ ). Berdasarkan fenomena tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.

Pertumbuhan Ekonomi sering digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Istilah pembangunan sangat kompleks jika diterjemahkan dalam kehidupan nyata. Tetapi dalam hal ini, yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan indeks pembangunan manusia. Pembangunan ekonomi dapat diukur dengan adanya pertumbuhan yang dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan pengorbanan berupa biaya-biaya operasional yang biasa disebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pengelolaan keuangan daerah, atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menjadi relavan dan penting bagi pemerintah daerah. APBD harus dikelola dengan baik untuk dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan tercapainya tujuan daerah yang telah ditetapkan maka dapat diketahui kinerja pemerintah daerah. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Adelfina dan Jember (2016), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Belanja Modal merupakan pembiayaan yang digunakan biasanya lebih dari satu tahun pengalokasian anggaran dan dipastikan menambah harta

pemerintah sehingga akan meningkatkan alokasi rutin untuk pembiayaan operasional dan pemeliharaannya. Alokasi belanja modal berarti menganggarkan setiap pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur, pengadaan barang dari berbagai macam sektor, Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan program sosial lainnya. Jika belanja modal dapat tepat sasaran, maka akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan manusia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Supadmi (2016), yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Upaya peningkatan pembangunan manusia dalam bidang kesehatan akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Untuk meningkatkan kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat diperlukan sarana dan fasilitas yang memadai. Rumah sakit adalah salah satu sarana dan fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah untuk mengatasi masalah kesehatan di setiap daerah. Rumah sakit dan puskesmas adalah pondasi dasar untuk meningkatkan angka harapan hidup yang layak bagi masyarakat. Semakin banyaknya jumlah rumah sakit dan puskesmas di setiap daerah maka pelayanan kesehatan akan memadai dan mendorong naiknya pembangunan manusia. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2014), yang menyatakan bahwa jumlah rumah sakit berpengaruh positif terhadap indeks pembangunan manusia.

Pendidikan adalah salah satu indikator utama dalam pembangunan dan juga penilaian dari kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Salah satu

faktor utama keberhasilan pembangunan di suatu negara adalah cukup tersedianya SDM yang berkualitas. Upaya peningkatan SDM berfokus pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan berkualitas diperlukan biaya. Biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan tidak sedikit, Oleh karena itu banyak siswa yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Pemerintah menyelenggarakan program yang salah satunya adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan dari program ini adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu sehingga kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan. Program BOS merupakan wujud kepedulian pemerintah dalam dunia pendidikan, yang secara signifikan telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2013), yang menyatakan bahwa Program BOS berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Berdasarkan berbagai uraian yang telah dijelaskan mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi, belanja modal, jumlah rumah sakit, dan program bantuan operasional sekolah terhadap indeks pembangunan manusia. Mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali Tahun 2013 – 2017”.

## **B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah bertujuan untuk membatasi agar permasalahan yang akan diteliti tidak melenceng sehingga terfokus dan tepat pada inti permasalahan dan pembahasannya, sehingga tujuan dari penelitian tidak menyimpang dari sasarannya. Maka dibuat batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Subjek penelitian ini dibatasi di Provinsi Bali, yaitu: Kabupaten Jembrana, Tabanan, Klungkung, Bangli, Gianyar, Karangasem, Badung, Buleleng dan Kota Denpasar.
2. Tahun yang dijadikan objek penelitian adalah tahun 2013 sampai dengan 2017.
3. Analisis diolah dengan menggunakan metode analisis data panel dan menggunakan data sekunder.
4. Analisis dilakukan terbatas pada variabel yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali. Variabel independen yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, belanja modal, jumlah rumah sakit, dan program bantuan operasional sekolah (BOS).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan sebagai masalah seperti berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?

2. Bagaimana pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?
3. Bagaimana pengaruh Jumlah Rumah Sakit terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?
4. Bagaimana pengaruh Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2013-2017
2. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2013-2017
3. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Rumah Sakit terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2013-2017

4. Untuk mengetahui pengaruh Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali pada tahun 2013-2017

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil, antara lain :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi tentang indeks pembangunan manusia (IPM) dan juga faktor yang mempengaruhinya.
  - b. Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi maupun pembanding bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian lebih lanjut tentang indeks pembangunan manusia (IPM).
2. Manfaat Praktis
  - a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi serta masukan kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan guna meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) di kabupaten/kota Provinsi Bali.